

## PENYELESAIAN KONFLIK PILKADA DI KABUPATEN TUBAN TAHUN 2006

**NOVIA PUSPITASARI**

Jurusan Pendidikan Sejarah  
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum  
Universitas Negeri Surabaya  
Email : [noviapuspitasari217@gmail.com](mailto:noviapuspitasari217@gmail.com)

**Nasution**

S-1 Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum  
Universitas Negeri Surabaya

### Abstrak

Konflik tidak bisa lepas dari kehidupan manusia, selama manusia masih membutuhkan orang lain selama itu pula konflik akan timbul. Di Indonesia khususnya pada masa peralihan dari orde baru ke reformasi banyak terjadi konflik politik. Salah satunya adalah konflik politik di Kabupaten Tuban. Konflik ini terjadi ketika pertama kali dijalankannya kebijakan pilkada langsung. Konflik pilkada yang terjadi di Kabupaten Tuban tersebut menimbulkan kerusakan yang menyebabkan banyak kerusakan. Dalam menyelesaikan konflik dibutuhkan sebuah penyelesaian konflik yang tepat. Beberapa orang lebih banyak mengatakan bahwa konflik menimbulkan banyak hal negatif, akan tetapi Lewis Coser mengatakan bahwa konflik selain mendatangkan dampak negatif juga akan menciptakan dampak positif.

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu 1) Apa yang melatar belakangi terjadinya konflik pilkada di Kabupaten Tuban tahun 2006? 2) Bagaimana penyelesaian konflik pilkada di Kabupaten Tuban tahun 2006 dari prespektif *safety valve* Lewis Coser? 3) Bagaimana fungsionalisme konflik yang ditimbulkan oleh konflik pilkada di Kabupaten Tuban tahun 2006? Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah memperoleh penjelasan mengenai latar belakang konflik dan resolusi konflik di Kabupaten Tuban. Penelitian ini juga menjelaskan analisis teori Lewis Coser terhadap fungsi positif dan negatif yang ditimbulkan konflik. Metode penelitian ini adalah metode penelitian sejarah yang terdiri dari heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Pada tahap heuristik peneliti mencari dan mengumpulkan sumber-sumber yang terkait dengan objek penelitian, sumber primer didapatkan dari majalah atau koran sezaman dan sumber sekunder didapatkan dari buku-buku dan jurnal online. Selanjutnya pada tahap kritik, sumber-sumber yang sudah ada dikelompokkan dalam sumber primer dan sekunder dan juga dicari kerelevan dari sumber dengan objek penelitian. Kemudian pada tahap interpretasi, mencari hubungan fakta satu dengan lainnya untuk ditafsirkan dengan merujuk beberapa referensi yang ada. Dan yang terakhir tahap historiografi adalah tahap penulisan sejarah berdasarkan fakta-fakta yang telah ditafsirkan.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan didapatkan hasil bahwa salah satu fungsi negatif konflik pilkada di Kabupaten Tuban berupa kerusakan pada bangunan-bangunan yang telah dibakar oleh para massa sedangkan dari fungsi positifnya yang paling penting adalah adanya beberapa pesan moral yang dapat dijadikan sebagai pembelajaran untuk masyarakat kedepannya. Diantara nilai moral yang dapat dipelajari dari konflik pilkada ini adalah; kejujuran, tanggung jawab, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, peduli lingkungan, kerja keras dan demokratis.

**Kata Kunci:** Konflik Pilkada, Pilkada Kabupaten Tuban 2006, Penyelesaian Konflik, Teori Lewis Coser

### Abstract

*Conflict cannot be separated from human life, as long as humans still need other people as long as that conflict will arise. Every country will face different conflicts. In Indonesia, especially during the transition from the new order to reform, there were many political conflicts. One of them is political conflict in Tuban Regency. This conflict occurred when the first direct election policy was implemented. The election conflict in Tuban Regency caused riots which caused a lot of damage. In resolving conflicts, an appropriate conflict resolution is needed. Some people say that conflict causes a lot of negativity, but Lewis Coser said that conflict in addition to bringing negative impacts will also create a positive impact.*

*The problems in this study are 1) what is the background of the local election conflict in Tuban Regency in 2006? 2) how about the election conflict resolution in Tuban Regency in 2006 from the perspective of the safety valve Lewis Coser? 3) how is the functionalism of conflict caused by the election conflict in Tuban Regency in 2006? The purpose of this study was to obtain an explanation of the background of conflict and conflict resolution in Tuban Regency. This study also explains Lewis Coser's theory of analysis of the positive and negative effect caused by conflict. The method of this research is a historical research method consisting of heuristics, criticism, interpretation and historiography. At the heuristic stage the researcher search for and and collects sources related to the object of research, primary sources obtained from contemporary magazines or newspapers and secondary sources obtained from books and online journals. Furthermore, at the criticism stage, existing sources are grouped in primary and secondary sources and are also sought to be relevant from sources with research objects. Then at the stage of interpretation, look for the relationship of facts to*

one another to be interpreted by referring to the existing references. And the last stage of historiography is the stage of writing history based on the facts that have been interpreted.

Based on the research that has been done, the results show that one of the negative function of regional election conflict in Tuban Regency is damage to buildings that have been burned by the masses while from the most important positive impact of the conflict there are several moral messages that can be used as learning for the community in the future. Among the moral values that can be learned from this election conflict are; honesty, responsibility, friendship or communicative, love of peace, caring for the environment, hard work and democratic.

**Keywords:** Election Conflict, 2006 Tuban Regency Election, Conflict Resolution, Lewis Coser Theory.

## PENDAHULUAN

Setiap negara akan menghadapi konflik ekonomi, etnis, sosial, politik dan sejumlah konflik lainnya. Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki banyak konflik politik, khususnya pada masa peralihan dari orde baru ke masa reformasi. Pada masareformasi pemilihan kepada daerah tidak ada campur tangan secara langsung oleh pemerintah pusat, semua diurus oleh DPRD setempat. Karena adanya sistem baru ini, banyak ditemukan praktek uang politik oleh para calon kepala daerah untuk mendapatkan dukungan dari para anggota DPRD. Sehingga pada bulan Juni 2005 pemilihan kepala daerah dan wakilnya dipilih secara langsung berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah secara langsung. Setelah undang-undang diberlakukan, mulai tahun 2005 pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung di 226 daerah, meliputi 11 pemilihan gubernur, 179 pemilihan bupati, dan 36 pemilihan walikota.<sup>1</sup>

Pelaksanaan pilkada langsung ini menjadi bentuk pelaksanaan otonomi daerah yang mana selain daerah diberikan hak untuk mengatur wilayahnya sendiri, juga dibebaskan menentukan pemimpin mereka sendiri. Dalam perubahan sistem politik untuk menentukan pemimpin daerah sendiri, masyarakat dianggap belum siap menjalankan. Banyak ditemukan kasus dan konflik yang terjadi dalam pelaksanaan pemilu yang dilakukan secara langsung. Terhitung sejak disahkannya Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah pada tahun 2005 sampai 2010 tercatat ada 124 kasus yang diajukan kepada pemerintah dan lima diantaranya menimbulkan kerusuhan. Konflik pasca pilkada yang berlanjut kerusuhan ini terjadi di Maluku Utara, Bengkulu, Aceh Tenggara, Sulawesi Barat dan Tuban.<sup>2</sup> Dari kelima daerah yang pilkadanya menimbulkan kerusuhan, Tuban adalah satu-satunya daerah yang letaknya di pulau Jawa, berdekatan dengan pemerintah pusat. Seharusnya dibandingkan dengan lima daerah lainnya Tuban merupakan wilayah yang terkontrol karena masih satu wilayah dengan pemerintah pusat. Selain itu masyarakat Tuban terkenal sebagai masyarakat yang guyub, akan tetapi dalam masalah pilkada langsung ini masyarakat menjadi arogan dan menimbulkan banyak kerusakan.<sup>3</sup>

Pada pilkada di Kabupaten Tuban tahun 2006 yang dilaksanakan secara langsung oleh masyarakat, dimenangkan oleh calon kepala daerah yang diusung oleh partai Golkar yang mengalahkan calon kepala daerah dari gabungan partai PDIP dan PKB. Kemenangan Golkar dalam pilkada di Kabupaten Tuban kali ini menimbulkan ketidakpuasan dari masyarakat, sehingga beberapa diantaranya melakukan aksi demo hingga menimbulkan kerusuhan. Tim Investigasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa menemukan sejumlah kecurangan sehingga meminta untuk diadakan pilkada ulang.

Pada tanggal 29 April 2006 ribuan masa pendukung Non-Stop mulai berkumpul di depan kantor KPUD dan melakukan orasi.<sup>4</sup> Kerusuhan yang terjadi di Tuban itu mengakibatkan sejumlah sarana pemerintah dan swasta hangusterbakar. Mulai dari pendopo Bupati, gedung Korpri, kantor Komisi Pemilihan Umum, sejumlah mobil dinas. Stasiun pengisian bahan bakar untuk umum, hotel mustika, mobil mewah dan Gudang 99 milik keluarga Bupati Haeny semua menjadi sasaran kemarahan massa. Selain itu rumah pribadi milik Ali Hasan (suami Bupati incumbent Haeny) di Jl. Agus Salim dan rumah megah di Kelurahan Mondokan juga turut dibakar oleh massa.

Konflik yang terjadi di Kabupaten Tuban yang sudah berujung menjadi kerusuhan tersebut membutuhkan penyelesaian konflik yang tepat untuk menyelesaikannya. Menurut Lewis Coser penyelesaian konflik dapat dengan menggunakan katup pengaman atau *safety valve*. Hal ini cukup berbeda dengan teori konflik yang digagas para sosiolog sebelumnya yang menyelesaikan konflik dengan beberapa langkah prosedur, kemampuan-kemampuan tertentu, perencanaan dan hal lain sebagainya. Lewis Coser cukup membagi Konflik menjadi konflik realistik atau non realistik untuk menentukan resolusi atau penyelesaian yang tepat melalui katup pengaman yang sesuai dengan masalah yang dihadapi.

Dari berbagai konflik yang terjadi, beberapa orang masih banyak yang beranggapan bahwa konflik hanya akan menimbulkan hal negatif, baik untuk saat ketika terjadi konflik maupun dampak setelah konflik. Akan tetapi Lewis Coser berpendapat bahwa dalam konflik selain ada dampak negatif juga terdapat nilai-nilai positif didalamnya. Coser memulainya dengan mendefinisikan konflik sosial sebagai suatu perjuangan terhadap nilai dan pengakuan terhadap status yang langka, kemudian

<sup>1</sup> Wahyudi, "Model Resolusi Konflik Pilkada", Volume 12, Nomor 2, Juli - Desember 2009, hlm. 141.

<sup>2</sup> Moch. Saifullah, Thesis S2: "Resolusi Konflik Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tuban 2006 Melalui Kerangka Konseptual Pendidikan IPS", Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2011, hlm. 4-5.

<sup>3</sup> Wawancara dengan Bapak Rajiman

<sup>4</sup> Radar Surabaya, 30 April 2006



kekuasaan dan sumber-sumber pertentangan dinetralisir atau dilangsungkan, atau dieliminir saingan-saingannya.<sup>5</sup> Bagi Lewis Coser konflik akan semakin menguatkan para anggota yang berkonflik, menumbuhkan jiwa persaudaraan dan persatuan antar anggota kelompok. Coser ingin menekankan konflik pada fungsionalisme, baik fungsi negatif maupun positifnya.<sup>6</sup>

Dengan menggunakan teori konflik Lewis Coser, penulis akan menganalisis konflik yang terjadi pada pilkada di Kabupaten Tuban tahun 2006 untuk mengetahui dampak negatif maupun positif yang disebabkan oleh konflik yang berujung pada kerusuhan tersebut. Selain itu penulis akan menganalisis bentuk penyelesaian konflik yang digunakan dalam penyelesaian konflik di Kabupaten Tuban, Sehingga penulis mengambil penelitian dengan judul *Penyelesaian Konflik Pilkada Di Kabupaten Tuban Tahun 2006*.

Dari judul tersebut peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang melatar belakangi terjadinya konflik pilkada di Kabupaten Tuban tahun 2006?
2. Bagaimana penyelesaian konflik pilkada di Kabupaten Tuban tahun 2006 dari perspektif *safety valve* Lewis Coser?
3. Bagaimana fungsionalisme konflik yang ditimbulkan oleh konflik pilkada di Kabupaten Tuban tahun 2006?

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan latar belakang terjadinya konflik pilkada di Kabupaten Tuban pada tahun 2006
2. Untuk mendeskripsikan bentuk penyelesaian konflik pilkada di Kabupaten Tuban tahun 2006
3. Untuk menganalisis fungsionalisme yang ditimbulkan oleh konflik pilkada di Kabupaten Tuban tahun 2006.

## METODE PENELITIAN

Metode merupakan cara untuk berbuat atau mengerjakan sesuatu dalam suatu sistem yang terencana dan teratur.<sup>7</sup> Penelitian ini termasuk dalam konteks penelitian ilmu sejarah sehingga penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari empat tahap, yang pertama adalah tahap heuristik merupakan proses mencari dan menemukan sumber-sumber yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti.<sup>8</sup> Sumber yang diperoleh selama penelitian adalah berasal dari Liputan 6 29 April 2006 dan 2 Mei 2006 berupa foto-foto pembakaran gedung. Laporan dan hasil rekapitulasi pilkada mulai tahun 2006-2015 dari KPUD Tuban, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan

Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Untuk surat kabar didapatkan dari radar surabaya 30 April 2006, Tempo 2 Mei 2006. Merdeka.com 31 Mei 2006 dan 6 Juni 2006 DetikNews 29 April 2006 dan 30 April 2006. Wawancara dengan pihak KPU, Panwaslu, pendukung HeLi, pendukung NonsTop, dan masyarakat terkait latar belakang kerusuhan, penyelesaian dan dampak dari konflik pilkada di Kabupaten Tuban tahun 2006.

Tahap kedua yaitu kritik, yang dibagi menjadi kritik intern dan kritik ekstren. Pada kritik intern, peneliti melakukan pengujian terhadap isi atau kandungan sumber yang diperoleh. Sedangkan untuk kritik ekstern adalah peneliti melakukan pengujian terhadap otentikitas, asli, turunan, serta relevan tidaknya suatu sumber. Dalam tahap kritik sumber, sumber-sumber yang didapat dikelompokkan ke dalam sumber primer atau sekunder selain itu memilih sumber yang relevan dengan tema yang akan diteliti, kemudian dilakukan analisa materi yang didapat agar diperoleh fakta yang terpercaya sehingga dapat digunakan dalam acuan penulisan. Pada tahap kritik dalam penelitian ini dilakukan pemilihan sumber yang sudah didapatkan dengan indikator teori Lewis Coser yang digunakan untuk menganalisis pada penelitian ini.

Tahap ketiga yaitu interpretasi, penulis mencari hubungan antara fakta satu dengan fakta lainnya yang telah diperoleh dari sumber primer maupun sekunder kemudian memberikan penafsiran dengan merujuk pada beberapa referensi yang mendukung permasalahan, sehingga pada akhirnya menjadi suatu rangkaian yang bermakna dan dapat menjawab semua rumusan masalah.

Tahap terakhir dari metode ini adalah historiografi, Pada tahap ini penulis telah menyusun ide-ide tentang hubungan satu fakta dengan fakta lain melalui kegiatan interpretasi, kemudian menuangkan dalam bentuk tulisan yang berjudul "penyelesaian konflik pilkada di kabupaten tuban tahun 2006". Bentuk tulisan disusun secara kronologis dengan topik yang jelas agar pembaca dapat memahaminya dengan mudah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Konflik Pilkada Di Kabupaten Tuban Tahun 2006

Banyak para ahli yang mendefinisikan pengertian dari konflik. Salah satunya menyebutkan bahwa konflik dapat diartikan sebagai setiap pertentangan atau perbedaan pendapat antara paling tidak dua orang atau kelompok. Konflik seperti ini dapat dinamakan konflik lisan atau konflik non-fisik. Bila konflik tersebut tidak dapat diselesaikan, ia dapat meningkat menjadi konflik fisik, yakni dilibatkannya benda-benda fisik dalam perbedaan pendapat. Percekocokan mulut antara dua orang adalah salah satu contoh konflik sosial yang termasuk kategori konflik lisan. Jika konflik lisan ini tidak dapat diselesaikan maka akan meningkat menjadi konflik fisik yang menggunakan benda-benda dalam membela pendapat

<sup>5</sup> Khabib Bima, dkk., "Teori Sosiologi Modern Teori Konflik Lewis A. Coser", Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2015, Hlm. 3, <https://www.researchgate.net/publication/327497761>, Diakses pada 1 Juni 2018.

<sup>6</sup> Ibid, Hlm. 4

<sup>7</sup> Suhartono W. Pranoto, "Teori & Metodologi Sejarah" Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, Hlm.11.

<sup>8</sup> Aminudin Kasdi, "Memahami Sejarah", Surabaya: Unipres Unesa, 2005, Hlm. 10.

masing-masing untuk mengalahkan (bahkan juga membunuh) pihak lain yang sudah berubah menjadi musuh.<sup>9</sup>

Pada masa reformasi ketika terjadi pemerataan kekuasaan di daerah-daerah. Pada masa ini pemilihan kepada daerah sepenuhnya berada ditangan DPRD tanpa ada campur tangan dari pemerintah pusat. Akan tetapi sistem ini ternyata mengandung kelemahan. Banyak ditemukan praktek uang politik oleh para calon kepala daerah untuk mendapatkan dukungan dari para anggota DPRD. Sehingga pada bulan Juni 2005 pemilihan kepala daerah dan wakilnya dipilih secara langsung berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah secara langsung. Pelaksanaan Pilkada langsung ini menjadi bentuk pelaksanaan otonomi daerah yang mana selain daerah diberikan hak untuk mengatur wilayahnya sendiri, juga dibebaskan menentukan pemimpin mereka. Akan tetapi perkembangan politik tersebut menimbulkan berbagai persoalan baik sebelum pemilihan, ketika pemilihan maupun setelah pemilihan.

Terhitung sejak disahkannya Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah pada tahun 2005 sampai 2010 tercatat ada 124 kasus yang diajukan kepada pemerintah dan lima diantaranya menimbulkan kerusuhan. Konflik pasca pilkada yang berlanjut kerusuhan ini terjadi di Maluku Utara, Bengkulu, Aceh Tenggara, Sulawesi Barat dan Tuban.<sup>10</sup> Dari kelima daerah yang pilkadanya menimbulkan kerusuhan, Tuban adalah satu-satunya daerah yang letaknya dipulau Jawa. Pulau Jawa yang notabene menjadi pusat pemerintahan dan pastinya juga menjadi pusat pendidikan dengan kualitas yang sangat baik, dengan pendidikan tersebut harusnya masyarakat lebih bisa memikirkan jalan keluar lain selain menimbulkan kerusuhan yang menyebabkan banyak kerugian meskipun tidak ada korban jiwa.

Pilkada di Kabupaten Tuban yang diselenggarakan secara langsung untuk pertama kalinya padatanggal 27 april 2006 ini menimbulkan konflik yang berujung kerusuhan. Kerusuhan pilkada di Kabupaten Tuban berawal ketika penghitungan cepat diperoleh hasil pasangan Haeny dan Lilik (HeLi) dapat dukungan 327.805 suara, sedangkan pasangan NonStop mendapatkan dukungan 305.560 suara. Meskipun hal itu belum dipastikan dan diresmikan oleh pihak KPU akan tetapi membuat masyarakat pendukung Non-Stop tidak terima dengan hasil pemungutan suara karena mereka menemukan beberapa kecurangan yang dilakukan didalam pilkada. Tim Investigasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa menemukan sejumlah kecurangan pilkada kala itu. Mereka menyebutkan kecurangan tersebut

meliputi politik uang dan penggelembungan suara serta penyusutan suara di sejumlah daerah.

Pada tanggal 29 April 2006 pukul 09.00, sekitar 15 ribu sampai 30 ribu masa pendukung Non-Stop mulai berkumpul di depan kantor KPUD dan melakukan orasi.<sup>11</sup> Laporan atas kecurangan yang disampaikan oleh partai pendukung NonsTop belum diproses, para massa sudah dulu membuat kerusuhan secara fisik. Kerusuhan yang terjadi di Tuban itu mengakibatkan sejumlah sarana pemerintah dan swasta hangus terbakar akibat aksi massa. Sontak kejadian ini menjadi sorotan beberapa media, dan dijadikan berita yang disiarkan secara nasional selama beberapa hari.

Mulai dari pendopo Bupati, gedung Korpri, kantor Komisi Pemilihan Umum, sejumlah mobil dinas. Stasiun pengisian bahan bakar untuk umum, hotel mustika, mobil dan Gudang 99 milik. Selain itu rumah pribadi milik Ali Hasan (suami Bupati incumbent Haeny) di Jl. Agus Salim dan rumah megah di Kelurahan Mondokan juga turut dibakar oleh massa yang sudah sangat memendam emosi.<sup>12</sup>

Api yang meluap begitu besar cukup lama dipadamkan karena, peralatan pemadaman yang sebelumnya tidak dipersiapkan. Sedangkan massa juga masih belum bisa dikendalikan oleh Polres Tuban, karena jumlah massa lebih banyak daripada pihak keamanan. Beberapa aparat keamanan tersebut ada yang terluka akibat massa yang melempari batu, untuk menerobos masuk ke tempat yang menjadi sasaran untuk dibakar. Akhirnya pada sekitar setengah dua siang, keadaan bisa dikendalikan setelah aparat keamanan dari polwil Bojonegoro, Polres Bojonegoro, Polres Jombang, Polres Lamongan, dan Polres Tuban serentak diturunkan.<sup>13</sup>

Gubernur Jawa Timur, Imam Utomo meminta untuk mengusut secara tuntas termasuk siapa yang menjadi dalang dan provokatornya.<sup>14</sup> Setelah keadaan mulai aman, tim penyidik gabungan Polda Jatim memeriksa 130 orang, dan telah menetapkan 90 orang sebagai pelaku. 4 diantara tersangka dianggap sebagai provokator.<sup>15</sup> Wakil calon Bupati yang kalah, Go Tjong Ping alias Teguh Prabowo dicurigai sebagai pemberi dana dari pergerakan massa sehingga akan dipanggil kepolisian untuk ditetapkan sebagai saksi terlebih dahulu.

Setelah tersangka ditetapkan pada tanggal 3 April dibacakan secara resmi perolehan penghitungan suara yang dimenangkan oleh pasangan HeLi dan pada tanggal itu pula Go Tjong Ping melaporkan KPUD Tuban ke Polda Jatim melalui advokasi PDIP. Gubernur Jawa Timur, Imam Utomo memiliki wacana untuk mengadakan pilkada ulang akan tetapi hanya jika pengadilan tinggi Jawa Timur menyatakan ada kesalahan yang terjadi.<sup>16</sup>

Dari penelitian yang dilakukan diketahui bahwa pihak dari pendukung NonsTop selain menganggap

<sup>9</sup> Maswadi Rauf, "Konsensus Dan Konflik Politik", Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2001, Hlm. 2.

<sup>10</sup> Moch. Saifullah, Thesis, "Resolusi Konflik Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tuban 2006 Melalui Kerangka Konseptual Pendidikan IPS" Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2011, Hlm. 4-5.

<sup>11</sup> Radar Surabaya, 30 April 2006

<sup>12</sup> Hilmy Mochtar, "Demokrasi dan Politik Lokal di Kota Santri", Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011, Hlm. 202

<sup>13</sup> "Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia", 21 Januari 2010, <https://www.kemendagri.go.id/index.php/blog/8354-Tuban-lautan-Api-Jam-Malam-Di-Berlakukan>. Diakses 19 September 2018.

<sup>14</sup> Loc.Cit.

<sup>15</sup> "Kerusuhan Tuban, Polisi Tetapkan 90 Orang Menjadi Tersangka", Minggu 30 April 2006, DetikNews.

<sup>16</sup> "Gubernur: Pilkada Ulang Tergantung Pengadilan Tinggi" Selasa 2 Mei 2006, Tempo.co



kekalahan calonnya akibat adanya kecurangan dari pihak lawan juga karena pasangan NonsTop ada yang berasal dari keturunan Cina. Ada sedikit kekecewaan bagi masyarakat yang ingin adanya pergantian pemimpin ketika mengetahui lawan dari Ibu Haeny berpasangan dengan keturunan Cina. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan dari Priyo Budi Santoso melalui salah satu saluran televisi dalam acara *Today Dialogue* bahwa Goh bukanlah nama yang layak untuk seorang Bupati Tuban.<sup>17</sup> untuk menarik simpati masyarakat Tuban Go Tjong Ping selama masa kampanye dan pilkada menggunakan nama Teguh Prabowo Gunawan. Akan tetapi, kemenangan tetap tidak berpihak pada pasangan NonsTop. Sehingga, sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, KPU melalui Gubernur Jawa Timur mengusulkan pengesahan dan pelantikan HeLi sebagai pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah periode 2006-2011 kepada Menteri Dalam Negeri.

Menurut pihak KPU, kerusuhan yang terjadi tersebut disebabkan dari belum siapnya pihak pelaksana pilkada maupun masyarakat terhadap adanya pilkada langsung dan pada waktu itu KPU juga kurang mensosialisasikan tentang sistem dan tata cara pemilu, maka untuk pemilu selanjutnya semua sudah dipersiapkan lebih baik dan matang dari sebelumnya.<sup>18</sup> Sehingga masyarakat lebih memahami tata cara dalam pilkada langsung, baik ketika menyalurkan hak suaranya maupun ketika menghadapi masalah dalam pilkada. Dan tentunya masyarakat lebih bisa legowo dan terima dengan keputusan menang atau kalah bagi calon yang didukungnya.

Selain dari pihak KPU dan masyarakat yang kurang siap dalam menjalankan pilkada, menurut penuturan Go Tjong Ping penyebab kerusuhan berasal dari persaingan bisnis, atau masalah pribadi. Menurut Go Tjong Ping yang melakukan kerusuhan bukan dari orang-orang pendukung pasangan NonsTop karena mereka sudah sangat terlatih.<sup>19</sup> Awalnya pengakuan dari Go Tjong Ping ini masih banyak yang meragukan apalagi setelah dia dinyatakan sebagai tersangka dari otak yang melakukan kerusuhan. Setelah pengadilan Tuban menetapkan vonis 3,5 tahun bagi Go Tjong Ping pada 10 Juli 2008 pada tanggal 20 Januari 2009 hakim Mahkamah Agung memberikan kebebasan sebab Go Tjong Ping tidak terbukti memberikan perintah pembakaran pasca pilkada, selain itu majelis hakim juga memerintahkan kepada jaksa penuntut umum agar segera mengeluarkan Go Tjong Ping dari tahanan.<sup>20</sup>

Dari beberapa penyebab kerusuhan yang terjadi banyak pihak yang memperbaiki sistem kerja terutama Bupati Haeny juga berusaha memperbaiki kepemimpinannya sehingga pada pilkada tahun 2011 di

Kabupaten Tuban yang diikuti oleh lima pasangan calon Bupati dan wakil Bupati terjadi secara damai karena tidak ada kekecewaan mendalam dari masyarakat.

## B. Penyelesaian Konflik Pilkada Di Kabupaten Tuban Tahun 2006

Penyelesaian konflik ini biasa juga disebut sebagai resolusi konflik. Menurut Mindes resolusi konflik merupakan kemampuan untuk menyelesaikan perbedaan dengan yang lainnya dan merupakan aspek penting dalam pembangunan sosial dan moral yang memerlukan keterampilan dan penilaian untuk bernegosiasi, kompromi serta mengembangkan rasakeadilan.<sup>21</sup> Untuk mendapatkan solusi yang baik dan akurat dalam penyelesaian sebuah konflik, perlu mengetahui proses pelaksanaan dari satu tahap ke tahap yang lain dari resolusi konflik. Setiap langkah pelaksanaannya harus diselesaikan dengan baik untuk mendapatkan solusi sesuai dengan yang diharapkan.

Untuk menyelesaikan sebuah konflik, Lewis Coser mempunyai mekanisme khusus yang disebut katup penyelamat (*safety valve*). Katup penyelamat ini menurut Lewis Coser dapat digunakan sebagai pertahanan kelompok dari kemungkinan konflik sosial atau digunakan untuk mempertahankan kelompok yang menghadapi konflik tanpa merusak hubungan kelompok itu sendiri dan juga dapat digunakan untuk mencari jalan keluar.<sup>22</sup> Katup penyelamat berbentuk institusi sosial dan juga berbentuk tindakan atau kebiasaan yang dapat mengurangi ketegangan, sebab konflik tidak bisa disalurkan. Sebelum katup penyelamat ini digunakan Lewis Coser terlebih dahulu membagi konflik menjadi dua, yaitu konflik non realistik dan realistik guna memudahkan mencari solusi dengan mudah.

Konflik non realistik atau disebut juga hubungan saingan, dalam konflik ini suatu kelompok menganggap kelompok lain sebagai saingannya dan semua merasa bahwa kelompok mereka benar. Sama halnya dengan konflik pada pilkada di Kabupaten Tuban Tahun 2006 antara calon Bupati dan wakil Bupati beserta tim suksesnya sama-sama bersaing untuk mencari dukungan demi kemenangan bersama. Kemudian setelah diketahui kemenangan berada suara sementara berada di pihak HeLi, pihak dari NonsTop tidak terima dan mencoba untuk mencari kecurangan yang dilakukan oleh pihak HeLi. Disinilah katup penyelamat atau *safety valve* memerankan perannya. Dalam kasus ini yang menjadi katup penyelamat adalah KPU dan Panwaslu. Untuk mencegah beberapa massa yang meminta dilakukan pilkada ulang, sebab tidak terima dengan kemenangan HeLi yang diduga melakukan kecurangan pihak dari KPU tidak mengumumkan kemenangan secara langsung dan memilih untuk menunda selama beberapa hari. Hal ini yang disebut Coser katup penyelamat sebagai pereda ketegangan. Sementara itu dari pihak Panwaslu berusaha memproses laporan-laporan yang

<sup>17</sup> Thung Ju Lan, "Catatan Tentang Orang Cina Indonesia dalam Politik Lokal", Kyoto review of Southeast Asia Issue, 2009.

<sup>18</sup> Wawancara dengan Ibu Yayuk Dwi A. S., S.H

<sup>19</sup> "Go Tjong Ping Dkk Diperiksa 10 Jam Lebih di Polda Jatim", 31 Mei 2006. Merdeka.com

<sup>20</sup> "Terpidana Kerusuhan Tuban Dibebaskan dari Tahanan", 24 Januari 2009, News Otomotif

<sup>21</sup> Gayle Mindes, "Teaching Young Children Social Studies", United States Of America: Praeger Publishers, 2006, Hlm. 24

<sup>22</sup> Rofiah Khusniati, "Dinamika Relasi Muhammadiyah dan NU Dalam Perspektif Teori Konflik Fungsional Lewis Coser", Jurnal Kalam, Vol. 10, No. 2, 2016, Hlm. 482

diajukan atas dugaan kecurangan baik dari pihak HeLi maupun NonsTop. Sebenarnya ini sudah menjadi solusi terbaik dalam menyelesaikan konflik persaingan yang terjadi. Akan tetapi sebelum laporan tersebut diselesaikan dan ditemukan titik terangnya, dari massa yang sebagian besar pendukung NonsTop sudah melakukan kerusuhan dengan membakar beberapa aset pemerintah maupun pribadi milik Ibu Haeny. Untuk konflik pilkada yang terjadi di Kabupaten Tuban pada tahun 2006 inidari Gubernur Jawa Timur, Imam Utomo meminta untuk mengusut secara tuntas termasuk siapa yang menjadi dalang dan provokatornya.<sup>23</sup>

Selanjutnya konflik realistik menurut Lewis Coser adalah konflik yang diperankan oleh pihak antagonis yang memiliki tujuan dan protagonis yang menuntut atas kekecewaan. Dalam kasus pilkada di Kabupaten Tuban tahun 2006 yang dianggap sebagai antagonis adalah pihak yang melakukan kerusuhan dengan memiliki tujuan supaya pilkada diulang kembali. Sedangkan dari pihak protagonis adalah pemerintah dan secara pribadi Ibu Haeny yang menuntut atas kekecewaan terhadap kerusakan yang disebabkan oleh pihak antagonis.

Dalam pelaksanaan pilkada disetiap daerah baik ketika kampanye, pelaksanaan maupun pasca pelaksanaan pilkada semua diatur dalam peraturan-peraturan yang berlaku. Pada masa pilkada 2006 di Kabupaten Tuban tersebut salah satunya menggunakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dengan adanya peraturan-peraturan yang berlaku masyarakat akan lebih teratur dan tertib menjalankan hak dan kewajiban sebagai masyarakat Indonesia dalam hal ini berpolitik.

Permasalahan dari pilkadadi Kabupaten Tuban tahun 2006 tidak berhenti hanya pada penetapan kemenangan Bupati Haeny dan wakil Bupati Lilik. Yang menjadi katup penyelamat disini adalah pihak keamanan khususnya kepolisian yang mencoba untuk mencari tersangka dan menahan beberapa yang sudah ditemukan. Dalam konflik pilkada di Kabupaten Tuban tahun 2006 untuk kerusuhan yang dilakukan dan dugaan kecurangan pihak KPUD termasuk dalam pelanggaran hukum sehingga akan diselesaikan secara hukum. Untuk konflik yang sudah berhubungan dengan hukum seperti tersebut maka yang berfungsi sebagai katup penyelamat bertambah lagi yaitu, MA.

Pada tanggal 3 Mei setelah pembacaan suara, KPUD dilaporkan oleh Go Tjong Ping ke polda Jawa Timur melalui advokasi PDIP. Permasalahan ini masih dianggap sangat penting, sebab jika persidangan dimenangkan oleh pihak pelapor (Go Tjong Ping) maka pemilu akan diulang kembali untuk mendapatkan

pemimpin baru yang sah dan akurat. Kemudian pada tanggal 5 Mei 2006 dilakukan sidang yang dimulai pada pukul 09.15 dan berakhir pukul 11.15 memberikan ketetapan hukum dengan memvonis tersangka, menetapkan dalang dari kerusuhan yang terjadi dan memutuskan bahwa pilkada tidak dapat diulang maupun dibatalkan. Jika kasus tersebut diteruskan maka akan saling mencari dan mencurigai terus menerus sedangkan Kabupaten Tuban segera membutuhkan pemimpin untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di Kabupaten Tuban. Majelis hakim menilai dalam 488 TPS ada penyusutan suara sebesar 11.431 dan penggelembungan suara sebesar 54.414 suara, akan tetapi dari penggelembungan maupun penyusutan suara tersebut tidak diketahui untuk suara calon Bupati yang mana.<sup>24</sup> Maka sesuai esuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, KPU melalui Gubernur Jawa Timur mengusulkan pengesahan dan pelantikan HeLi sebagai pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah periode 2006-2011 kepada Menteri Dalam Negeri.

Pelanggaran hukum lain yang terjadi karena pilkada di Kabupaten 2006 di Tuban adalah pelanggaran HAM yang dilakukan oleh massa dari pihak tim sukses NonsTop, karena tidak hanya merusak dan membakar aset pemerintahan tetapi juga membuat kerusuhan pada aset pribadi milik dari keluarga Ibu Haeny.<sup>25</sup> Selain itu adapula pelanggaran HAM yang terjadi yaitu, pihak tim sukses NonsTop yang menjadi tersangka amuk massa mendapatkan siksaan ketika berada di tahanan kepolisian. Jika komnas HAM mendapatkan kebenaran-kebenaran ini, maka akan dianggap bahwa pendukung HeLi ataupun NonsTop sama-sama menjadi korban pelanggaran HAM.<sup>26</sup>

### C. Fungsionalisme Konflik Pilkada Di Kabupaten Tuban Tahun 2006

Beberapa masyarakat Tuban mengatakan bahwa konflik pilkada yang terjadi di Tuban pada tahun 2006 menimbulkan banyak kerusakan dan ketakutan atau kata lainnya masyarakat hanya memfokuskan pada dampak negatifnya. Sedangkan menurut salahsatu ahli sosiologi Lewis Coser konflik tidak semata-mata menunjukkan fungsi negatifnya saja, tetapi dapat juga menimbulkan dampak positif bagi pelaku konflik.<sup>27</sup> Lewis Coser juga mengatakan bahwa ketika konflik konsisten untuk mencapai tujuan penggabungan ataupun perlawanan, maka hal itu akan menimbulkan nilai yang berharga terhadap kelompok. *“Conflict is not always dysfunctional for the relationship within which is occurs, often conflict is necessary to maintain such a relationship.”*<sup>28</sup>

<sup>23</sup> Loc.Cit.

<sup>24</sup> “Gugatan Pilkada Tuban Ditolak, Go Tjong Ping Ajukan PK”, Selasa 6 Juni 2006, Merdeka.com

<sup>25</sup> Wawancara dengan Ibu Yayuk Dwi A. S., S.H.

<sup>26</sup> Slamet Hariyanto, “Amuk Massa dan Sengketa Hukum Pilkada Tuban”, 2006, <https://slamethariyanto.wordpress.com/2006/06/01/amuk-massa-dan-sengketa-hukum-pilkada-tuban/>. Diakses pada 12 November 2018

<sup>27</sup> Chusnul Chotimah, Skripsi, “Respon Masyarakat Tentang Keberadaan Kandang Ayam Dalam Tinjauan Teori Konflik Lewis Coser”, Surabaya: Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2015, Hlm. 73.

<sup>28</sup> Robi Panggarra. “Konflik Kebudayaan Menurut Teori Lewis Alfred Coser dan Relevansinya dalam Upacara Pemakaman (Rambu Solo) Di Tana Toraja”, Jurnal Jaffray. Vol. 12, No. 2, 2014, Hlm. 293



Fungsi positif dari konflik pilkada di Kabupaten Tuban tahun 2006 adalah meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok (*in-group solidarity*) yang sedang berkonflik dengan kelompok lain.<sup>29</sup> Pada konflik pilkada 2006 di Kabupaten Tuban terlihat kekompakan dan solidaritas yang tinggi dari tim sukses pasangan NonsTop ketika pasangan calon yang didukung kalah mereka mencoba mencari kecurangan yang dilakukan pihak lawan bahkan para pendukung NonsTop sampai melakukan serangan. Dan dari tim sukses HeLi juga tak kalah kompak untuk memberikan dukungan terhadap Ibu Haeny dan Bapak Lilik untuk melanjutkan kemenangan pilkada 2006 serta memberikan kekuatan untuk menghadapi berbagai serangan dan fitnah yang dilakukan oleh pihak lawan.

Konflik ini dapat dijadikan sebagai pembelajaran untuk memperbaiki kinerja dari pemerintahan, KPU, PANWASLU, keamanan dan bahkan dari masyarakatnya sendiri.<sup>30</sup> Istilahnya belajar kesalahan supaya tidak menimbulkan kesalahan baru yang serupa atau bahkan kesalahan yang lebih besar.<sup>31</sup>

Konflik ini dapat membentuk kemandirian dalam diri masyarakat khususnya bagi para tersangka, bahwa setelah mereka dijadikan tersangka tidak adayang bisa mengantikan hukuman mereka, tidak ada yang bisa membebaskan mereka kecuali mereka membayar sendiri atas kerusakan yang telah ditimbulkan. Bahkan pasangan calon yang didukungnya juga tidak dapat memberikan kebebasan sebab semua sudah ditindak secara hukum.

Konflik ini juga dapat membantu untuk menghidupkan kembali bahkan menciptakan baru norma-norma dan nilai-nilai dalam kehidupan bermasyarakat. Dari konflik pilkada di Kabupaten Tuban ini yang paling penting banyak nilai moral yang bisa dipelajari, misalnya kita harus bersikap jujur, tidak menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan konflik, harus adil dan punya sifat legowo menerima kekalahan. Kemudian dari adanya konflik di tuban tersebut juga menjadi pelajaran untuk kita menghidupkan kembali nilai kerukunan dan budaya gotong royong yang sudah melekat pada masyarakat Tuban.

Konflik pilkada yang pernah terjadi di Kabupaten Tuban ini dapat dijadikan sebagai alternatif dalam menentukan penggunaan model pembelajaran berbasis konflik. Dari penelitian yang sudah dilakukan rata-rata hasil belajar siswa dengan menggunakan model resolusi konflik berbasis masalah lebih tinggi daripada sebelumnya.<sup>32</sup>

Sedangkan untuk fungsi negatif dari konflik pilkada di Kabupaten Tuban adalah pilkada yang terjadi di Kabupaten Tuban tahun 2006 berujung adanya konflik dan amuk massa dengan melempari gedung-gedung pemerintah menggunakan batu yang kemudian disusul aksi

pembakaran pada aset-aset milik pemerintahan maupun milik pribadi dari Ibu Haeny. Akibat pembakaran ini banyak terjadi kerusakan pada bangunan pemerintahan maupun milik pribadi dari Ibu Haeny. Selain itu massa merusak satu unit mobil PMK sehingga kondisi badan mobil penyok-penyok dan kaca depan berantakan. Peralatan pemadam kebakaran juga telah rusak sehinggabanyak yang tidak berfungsi lagi.<sup>33</sup>

Konflik pilkada di Kabupaten Tuban yang berujung kerusakan ini juga meyebabkan adanya korban, meskipun hanya korban luka-luka. Aparat kepolisian yang mencoba menghentikan tindakan anarkis dari para massa mendapat sambutan berupa lemparan batu. Dan ada juga satu wartawan televisi yang mengalami bocor kepala akibat terkena lemparan batu saat mencoba untuk membuat liputan aksi anarkis tersebut.<sup>34</sup>

Timbulkan kerusakan sudah dipastikan akan menimbulkan banyak kerugian pula. Banyak danayang akan dikeluarkan untuk merenovasi gedung-gedung yang sudahrusak akibat kebakaran. Selain itu ada juga biaya untuk memadamkan kebakaran dan untuk penjagaan malam oleh pihak keamanan.

Karena konflik yang tidak diselesaikan dengan cara komunikasi antar kedua belah pihak makakesalah pahaman itu masih ada dan akan menimbulkan rasa dendam diantara keduanya. Satu pihak merasa tidak puas atas kemenangan lawan sedangkan pihak lainnya merasa dirugikan atas aksi kerusakan yang dibuat.

Kerusuhan dan keonaran yang terjadi di Kabupaten Tuban pada tahun 2006 lalu membuat masyarakat juga beberapa ada yang takut keluar rumah saat pemilu setelah 2006 karena trauma dengan amuk massa.<sup>35</sup> Dari pihak KPU sendiri juga ada rasa trauma terhadap kerusakan yang telah ditimbulkan pada pilkada tahun 2006. Untuk itu di pilkada tahun 2011 KPU tidak menggunakan perhitungan cepat (*quict count*). Sebab, perhitungan cepatpada pilkada tahun 2006 yang memicu timbulnya protes dari tim pasangan calon bupati wakil bupati NonsTop.<sup>36</sup> Rasa trauma pada pilkada2006 ini masih dirasakan oleh masyarakat Tuban khususnya bagi pelaksana pilkada. Sehingga pada pilkada tahun 2011 pengamanan sangat diperketat supaya bisa mencegah bila terjadi kerusuhan politik yang sama pada tahun 2006.<sup>37</sup>

Dengan adanya konflik pilkada padatahun 2006 di Kabupaten Tuban kala itu, membuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan menurun. Dari adanya kecurangan yang dilaporkan, masyarakat dapat menilai bahwa pelaksanaan pilkada tidak berjalan sesuai prosedur yang. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pemilih yang tidak hadir semakin tahun semakin meningkat. Pada tahun 2006 jumlah pemilih tetap yang tidak hadir adalah 191.189 orang, pada tahun 2011 yang tidak hadir sejumlah 215.869

<sup>29</sup> "Dampak Positif dan Negatif Konflik Sosial", 9 february 2018, <https://hisham.id/2016/05/dampak-positif-dan-negatif-konflik-sosial.html>. Diakses 20 november 2018.

<sup>30</sup> Wawancara dengan Ibu Yayuk Dwi A. S., S.H.

<sup>31</sup> Wawancara dengan Ibu Suhartatik, S.H., M.M

<sup>32</sup> Ni Putu Indra Rusminiati, "Model Pembelajaran Resolusi Konflik Berbasis Masalah Kontekstual Berpengaruh Terhadap Hasil Belajar IPS Siswa Kelas V SD Gugus 1 Abiansemal", Mimbar PGSD UNDIKSHA, Vol. 2, No. 1, 2014.

<sup>33</sup> "Eskalasi Kerusuhan Tuban Menyusut", Merdeka.com, 29 April 2006, <https://www.merdeka.com/peristiwa/eskalasi-kerusuhan-tuban-menyurut-cmq1ngz.html>. Diakses 20 Oktober 2018

<sup>34</sup> "Tuban Geger, Kantor KPU & Bupati Dibakar", DetikNews, Sabtu 29 April 2006, <https://news.detik.com/berita/584787/tuban-geger-kantor-kpu--bupati-dibakar>. Diakses 20 oktober 2018.

<sup>35</sup> Wawancara dengan Ibu suhartatik, S.H., MM

<sup>36</sup> Wawancara dengan Ibu Yayuk Dwi A. S., S.H

<sup>37</sup> Wawancara dengan Bapak Muji

orang dan pada tahun 2015 jumlah pemilih tetap yang tidak hadir dalam pencoblosan sebesar 449.721 orang. Padahal setiap tahunnya jumlah pemilih tetap selalu bertambah.

## PENUTUP

### Simpulan

Konflik pilkada di Kabupaten Tuban yang sudah terjadi sekitar 12 tahun ini memberikan banyak pelajaran khususnya bagi masyarakat Tuban. Konflik yang terjadi di Kabupaten Tuban, sebenarnya dianggap wajar mengingat konflik tersebut terjadi pada pilkada pertama kali yang dipilih rakyat secara langsung, karena banyak masyarakat yang belum mempunyai kemampuan untuk menjalankan pilkada langsung tersebut. Kemampuan disini maksudnya adalah bukan hanya kecakapan dalam berpolitik tetapi tentang kemampuan siap kalah dan siap menang. Dalam pilkada di Kabupaten Tuban tahun 2006 masyarakat dianggap belum dewasa dalam menjalankan pilkada sebab beberapa diantaranya masih belum bisa menerima kekalahan bagi pihak yang kalah. Ini terjadi pada para pendukung pasangan calon dan wakil calon bupati Tuban yang disingkat NonStop, mereka mencari kecurangan yang dilakukan oleh pihak yang dari perhitungan cepat memenangkan suara, yaitu pasangan yang diberi singkatan HeLi. Selain mencari kesalahan dari pasangan HeLi pendukung NonStop juga melakukan orasi yang berujung pada kerusuhan.

Menurut pihak KPU, kerusuhan yang terjadi tersebut disebabkan dari belum siapnya pihak-pihak pelaksana pilkada maupun masyarakat terhadap adanya pilkada langsung KPU juga kurang mensosialisasikan tentang pilkada pada masa itu. Selain dari pihak KPU dan masyarakat yang kurang siap dalam menjalankan pilkada, kerusuhan di Kabupaten Tuban, yaitu keinginan beberapa masyarakat untuk adanya pergantian pemimpin dan juga kemarahan dari rekan bisnis suami Ibu Haeny.

Dari kerusuhan yang terjadi di Kabupaten Tuban sampai diadakan sidang pada tanggal 5 Mei 2006 di pengadilan tinggi Jawa Timur, tuduhan yang disebutkan oleh pihak NonStop tidak terbukti. Memang ada pengelembungan dan penyusutan suara tetapi suara tersebut tidak diketahui untuk pasangan HeLi atau NonStop. Pihak NonStop menganggap kealahannya disebabkan oleh pihak lawan akan tetapi ada sumber yang menyebutkan kekalahan tersebut dipengaruhi karena wakil dari Bupati adalah keturunan Cina.

Pada pilkada 2006 Go Tjong Ping berusaha untuk mengambil hati masyarakat dengan menggunakan nama Teguh Prabowo Gunawan dalam masa kampanye. Akan tetapi keberuntungan masih belum berpihak terhadap pasangan dari NonStop bahkan Go Tjong Ping sempat ditahan beberapa bulan dengan tuduhan sebagai yang mendanai kerusuhan yang dilakukan oleh massa. Hal tersebut bersamaan juga dengan adanya keputusan pilkada ulang tidak perlu diadakan. Kemudian pada hari itu juga KPU mengadakan rapat pleno dan menentukan secara

resmi bahwa kemenangan berada di pasangan calon bupati dan wakil bupati HeLi.

Bentuk dari penyelesaiannya dalam penelitian ini telah dianalisis dengan teori Lewis Coser. Menurut Lewis Coser katup penyelamat merupakan penyelesaian konflik yang dilakukan melalui suatu lembaga dengan mekanisme khusus untuk mengatur memperbaiki keadaan, menghambat permusuhan dan mencairkan ketegangan individu. Atau dengan kata lain katup penyelamat ini bisa digunakan sebagai media untuk menyampaikan isi hati dari kelompok yang berkonflik.<sup>38</sup> Untuk konflik yang berhubungan dengan hukum pada konflik pilkada di Kabupaten Tuban tahun 2006 tersebut sudah ditemukan penyelesaiannya dengan menangkap dan menetapkan tersangka kerusuhan.

Sedangkan untuk masalah yang berhubungan dengan kemanusiaan konflik tersebut belum mencapai resolusi konflik yang seharusnya terjadi. Sebab belum ada komunikasi secara langsung antara pihak HeLi maupun pihak NonStop untuk bertemu dan membicarakan masalah untuk kemudian berdamai. Output dari katup penyelamat adalah aspek aksiologinya karena menjelaskan tentang tujuan dan nilai-nilai yang terkandung dalam konflik. Nilai-nilai tersebut bisa berupa nilai negatif maupun nilai positif.

Setiap konflik yang ada akan meninggalkan jejak positif maupun negatif baik bagi pelaku konflik maupun bagi masyarakat lain. salah satu dari sisi positif konflik pilkada di Kabupaten Tuban adalah dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan integritas antar kelompok yang berkonflik, selain itu nilai positif dari konflik tersebut adalah sebagai pembelajaran bagi pihak pelaksana pilkada, masyarakat maupun dapat digunakan dalam pembelajaran bagi anak-anak didik. Belajar tentang konflik yang nyata terjadi dalam kehidupan adalah penting sebab, ketika seorang anak belajar tentang konflik maka anak-anak akan mengetahui apa saja penyebab dari konflik dan ketika sudah mengerti maka, mereka dapat menghindari karakter buruk yang ada dalam konflik supaya tidak terjadi konflik yang sama dikemudian hari. Untuk fungsi negatif dari konflik pilkada di Kabupaten Tuban ini yang sangat nampak adalah adanya kerusakan pada aset pemerintah dan aset pribadi milik keluarga Ibu Haeny. Dan hal ini tentunya menyebabkan kerugian yang besar.

### Saran

Konflik pilkada di Kabupaten Tuban tahun 2006 adalah konflik yang paling anarkis, rusuh, menimbulkan banyak kerusakan dan kerugian bagi Kabupaten Tuban. Konflik ini harus diketahui oleh banyak orang terutama masyarakat Tuban, supaya banyak yang mempelajari tentang konflik ini sehingga tidak terjadi konflik yang serupa. Untuk itu, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Tuban, harus membuat sebuah karya buku tentang konflik pilkada di Kabupaten Tuban tahun 2006. Supaya dapat

<sup>38</sup> Dewi Indriani, dkk., "Teori Konflik Menurut Lewis Coser", Makalah: Universitas Mataram, 2014.



mengenang sejarah lokal yang pernah terjadi di Kabupaten Tuban, meskipun konflik ini termasuk sejarah yang dianggap kurang baik di Kabupaten Tuban. Selain itu buku tersebut juga dapat digunakan sebagai media untuk belajar tentang konflik tersebut.

2. Masyarakat Tuban dan generasi penerus dapat mempelajari tentang konflik yang pernah terjadi di Kabupaten Tuban, untuk mengetahui kebenaran yang terjadi supaya tidak ada kesalahpahaman. Dan selain itu juga supaya kelak tidak menggulangi konflik yang sama di daerah tercinta, Kabupaten Tuban.
3. Tenaga Pendidik, dapat menggunakan konflik pilkada di Kabupaten Tuban tahun 2006 sebagai media untuk mengetahui perkembangan politik pada masa reformasi. Pada KD 3.8 mengevaluasi perkembangan politik, ekonomi, sosial budaya dan pendidikan pada masa orde baru dan reformasi. Khususnya pada materi perkembangan politik, ekonomi, sosial budaya dan pendidikan pada masa reformasi. Selain itu konflik pilkada di Kabupaten Tuban dapat juga digunakan untuk mengetahui konflik dan resolusi konflik dengan konflik nyata, serta mengajarkan peserta didik tentang karakter yang baik dan buruk lewat peristiwa konflik yang terjadi supaya peserta didik belajar menghadapi konflik dan menyelesaikan konflik dengan karakter yang baik saat menghadapi konflik kehidupannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Agus, M Hardjana. 1994. *Stres Tanpa Distres: Seni Mengolah Stres*, Yogyakarta: Kanisius.
- Amirudin Dan A. Zaini Bisri. 2006. *Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Langsung Problem Dan Prospek Sketsa Singkat Perjalanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2005*, Yogyakarta: Pusataka Pelajar.
- Craib, Ian. 1992. *Teori-Teori Sosial Modern*, Jakarta: CV. Rajawali.
- Dahrendorf, Ralf. 1959. *Class and Class Conflict in Industrial Society*, (London: Routledge; First Pub. 1957).
- Kansil, C.S.T. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kasdi, Aminudin. 2005, *Memahami Sejarah*. Surabaya: Unipres Unesa.
- Koesoema, A. Doni. 2012. *Pendidikan Karakter Utuh Dan Menyeluruh*, Yogyakarta: Kanisius.
- Maf'ula, Muhhsin. 2014. *Proses Pelaksanaan Pilkada Tahun 2006 di Tuban*. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Mindes, Gayle. 2006. *Teaching Young Children Social Studies*, United States Of America: Praeger Publishers.
- Mochtar, Hilmy. 2011. *Demokrasi dan Politik Lokal di Kota Santri*. Malang: Universitas Brawijaya Press
- Raho, Bernard. 2007. *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Rauf, Maswadi. 2001. *Konsensus Dan Konflik Politik*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Sahlan, Asmaun Dan Angga Teguh Prasetya. 2012. *Desain Pembelajaran Berbasis Pendidikan Karakter*. Yogyakarta: Arruz Media.
- Soeparmono, R. 1983. *700 Tahun Tuban*. Tuban: Depdikbud
- Wulansari, Dewi. 2009. *Sosiologi Konsep Dan Teori*, Bandung: Refika Aditama.

### Jurnal dan Makalah

- Bates, Robert. Avner Greif and Smita Sigh. 2002. *Organizing violence. Journal of Conflict Resolution*. 46: 599.
- Chotimah, Chusnul. 2015. Thesis. *Respon Masyarakat Tentang Keberadaan Kandang Ayam Dalam Tinjauan Teori Konflik Lewis Coser Di Dusun Sumuralas Desa Gajah Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro*. Surabaya: Uin Sunan Ampel Surabaya.
- Hilal, Ahmad Wani. 2011. *Understanding Conflict Resolution*. International Journal of Humanities and Social Science. Vol. 1 No. 2.
- Indra Rusminiati, Ni Putu. 2014. *Model Pembelajaran Resolusi Konflik Berbasis Masalah Kontekstual Berpengaruh Terhadap Hasil Belajar IPS Siswa Kelas V SD Gugus 1 Abiansemal*. Mimbar PGSD UNDIKSHA. Vol. 2 No. 1.
- Panggarra, Robi. 2014. *Konflik Kebudayaan Menurut Teori Lewis Alfred Coser dan Relevansinya dalam Upacara Pemakaman (Rambu Solo) Di Tana Toraja*. Jurnal Jaffray. Vol. 12, No. 2.
- Saifullah, Moch. 2011. *Resolusi Konflik Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tuban 2006 Melalui Kerangka Konseptual Pendidikan IPS*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Wahyudi. 2009. *Model Resolusi Konflik Pilkada*. Jurnal Salam. Vol. 12. No. 2.
- Yingshan, Bao. Fangwei Zhu, Yue Hu, Ning Cui. 2016. *The Research of Interpersonal Conflict and Solution Stategis*. Psychology, vol. 7.

### Surat Kabar Cetak dan Online

- Eskalasi Kerusuhan Tuban Menyusut*. Sabtu, 29 April 2006. Merdeka.com.
- Gubernur: Pilkada Ulang Tergantung Pengadilan Tinggi*. Tempo.co. 2 Mei 2006.
- Gugatan Pilkada Tuban Ditolak, Go Tjong Ping Ajukan PK*. Merdeka.com. 6 Juni 2006.

*Hari ini Warga Tuban Memilih.* Kompas, 1 maret 2011.

Jawa Pos, 1 Mei 2006

Jurnalberita.com, 12 November 2010

*Kerusuhan Tuban, Polisi Tetapkan 90 Orang Menjadi Tersangka.* DetikNews. 30 April 2006.

Liputan6. 5 Mei 2006.

Radar Surabaya, 30 April 2006

Surya, 9 Januari 2011

Tempo Interaktif, 22 Mei 2006

*Tuban Geger, Kantor KPU & Bupati Dibakar.* Sabtu 29 April 2006. DetikNews.

#### Internet

Afid, Rapidli. 2017. *Mengajarkan Anak-Anak Untuk Menyelesaikan Konflik,* (<https://Kumparan.Com/Rapidli-Afid/Mengajarkan-Anak-Anak-Untuk-Menyelesaikan-Konflik-1500819774045>) Diakses 20 Agustus 2018.

Hariyanto, Slamet. 2006. *Amuk Massa dan Sengketa Hukum Pilkada Tuban.* <https://slamethariyanto.wordpress.com/2006/06/01/amuk-massa-dan-sengketa-hukum-pilkada-tuban/>. Diakses pada 12 Desember 2018

Irfan, Mahfudz. 2016. *Mengenal Teori Resolusi Konflik,* (<http://Mahfudzirfan.Blogspot.Com/2016/08/Mengenal-Teori-Resolusi-Konflik.Html>) Diakses 26 Juni 2018.

*Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.* 21 Januari 2010. <https://www.kemendagri.go.id/index.php/blog/8354-Tuban-lautan-Api-Jam-Malam-Di-Berlakukan>. Diakses 19 September 2018.

Pahlevi, Oktav. 2008. *Cerita singkat dari Tuban.* Centre for social and Community Studies (C S C S), diakses dari <http://cscs-indonesia.blogspot.co.id/2008/08/cerita-singkat-dari-tuban.html>, Diakses 11 Januari 2018.

#### Wawancara

Wawancara dengan Ibu Endang Witiningsih, S.Pd.

Wawancara dengan Ibu Putriana N. S., S.Pd

Wawancara dengan Ibu Suhartatik, S.H., MM

Wawancara dengan Ibu Yayuk Dwi A. S., S.H.

Wawancara dengan Bapak Rajiman

Wawancara dengan Bapak Muji